

# Transformasi Demokrasi: Inklusi digital untuk keadilan sosial global

Yasin Rahadatul Syiham

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: muhammadsaminkaslait@gmail.com

## Kata Kunci:

Inklusi Digital, Demokrasi deliberatif, Keadilan sosial global, Kesenjangan digital, Partisipasi politik, tata kelola digital.

## Keywords:

Digital inclusion, deliberative democracy, global social justice, digital divide, political participation, digital governance.

## ABSTRAK

Dalam zaman konvergensi teknologi dan pengelolaan global, inklusi digital telah menjadi syarat dasar untuk menciptakan demokrasi yang substansial dan adil. Perbedaan akses terhadap infrastruktur digital—termasuk koneksi internet, kemampuan teknologi, dan kepemilikan perangkat—tidak hanya mencerminkan ketidaksetaraan ekonomi yang ada, tetapi juga secara sistematis memproduksi ulang eksklusivitas politik dan sosial. Studi ini menganalisis hubungan kausal antara inklusi digital dan penguatan demokrasi dalam konteks keadilan sosial global, dengan mengidentifikasi mekanisme struktural yang mendukung atau menghalangi partisipasi warga secara setara dalam ruang public digital. Dengan menggunakan pendekatan multidisipliner

yang menggabungkan teori demokrasi deliberatif, ekonomi politik digital, dan studi pembangunan global, penelitian ini menganalisis bagaimana kesenjangan digital (digital divide) mempertahankan hierarki kekuasaan yang ada dan juga menciptakan bentuk marginalisasi baru—terutama bagi perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan komunitas di negara-negara berkembang. Sebaliknya, penelitian ini juga menyelidiki potensi transformatif teknologi digital dalam memperluas ruang partisipasi politik, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, dan menggerakkan gerakan sosial antar negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi demokrasi yang autentik memerlukan lebih dari sekadar peningkatan akses terhadap teknologi; ia memerlukan perubahan kebijakan digital yang berfokus pada hak (rights-based approach), penguatan kapasitas masyarakat lokal, serta pengaturan yang membatasi dominasi kekuasaan platform digital oleh sejumlah aktor global. Inklusi digital, dalam konteks ini, bukan hanya alat pembangunan, tetapi juga aspek fundamental dari proyek emansipasi demokratis abad ke-21.

## ABSTRACT

In the age of technological convergence and global governance, digital inclusion has become a basic requirement for creating a substantial and fair democracy. Differences in access to digital infrastructure—including internet connections, technological capabilities, and device ownership—not only reflect existing economic inequalities, but also systematically reproduce political and social exclusion. This study analyzes the causal relationship between digital inclusion and strengthening democracy in the context of global social justice, by identifying structural mechanisms that support or hinder citizens' equal participation in digital public spaces. Using a multidisciplinary approach that combines deliberative democracy theory, digital political economy, and global development studies, this research analyzes how the digital divide maintains existing power hierarchies and also creates new forms of marginalization—especially for women, indigenous peoples, people with disabilities, and communities in developing countries. Conversely, this research also investigates the transformative potential of digital technology in expanding the space for political participation, increasing government accountability, and mobilizing social movements between countries. The results of this research show that authentic democratic transformation requires more than simply increasing access to technology; This requires changes to digital policies that focus on rights (rights-based approach), strengthening the capacity of local



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

communities, as well as regulations that limit the domination of digital platforms by a number of global actors. Digital inclusion, in this context, is not only a development tool, but also a fundamental aspect of the 21st century project of democratic emancipation.

---

## Pendahuluan

Di era globalisasi dan kemajuan pesat dalam teknologi informasi, demokrasi digital telah muncul sebagai konsep yang menarik bagi banyak negara, termasuk Indonesia (Wahidin et al., 2025). Di tengah perubahan ini, sebagai negara terpadat keempat di dunia, Indonesia, dengan keragaman budayanya yang kaya, menghadapi tantangan dan peluang yang unik dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kerangka kerja politik dan pemerintahannya (Hafel, 2023). Sejak reformasi 1998, Indonesia telah mengalami trmenuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Salah satu pendorong utama kemajuan demokrasi digital di Indonesia adalah akses internet yang luas dan prevalensi penggunaan media sosial. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ratusan juta pengguna internet, menempatkannya di antara negara-negara dengan jumlah pengguna internet tertinggi di dunia. Media sosial, sebagai platform komunikasi yang paling umum, telah muncul sebagai ruang baru untuk wacana politik, mobilisasi massa, dan keterlibatan publik (Rachimoellah dkk., 2024). Namun, perkembangan ini juga disertai dengan tantangan baru yang muncul, terutama terkait teknologi informasi dan komunikasi. Internet merupakan alat yang ampuh untuk mobilisasi politik, penyampaian informasi, potensi besar untuk mengembangkan demokrasi digital yang inklusif.(Zaman et al., 2024)

Walaupun Digitalisasi dianggap sebagai kemajuan dan efisiensi didalamnya masih terdapat persoalan mendasar yang menjadi tantangan global, yaitu kesenjangan digital (digital divide). Konsep kesenjangan digital kini bukan lagi dipahami sebatas perbedaan kepemilikan perangkat atau akses internet semata, melainkan sebagai ketimpangan multidimensional yang meliputi akses, kemampuan, partisipasi, hingga manfaat sosial dari penggunaan teknologi (Van Dijk, 2020). Digitalisasi pada kenyataannya tidak selalu bersifat membebaskan, tetapi juga dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial yang telah berlangsung sebelumnya. Oleh karena itu, kesenjangan digital dipandang sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan, sumber daya, dan peluang dalam masyarakat (Laskar, 2023; Robinson et al., 2020; Tewathia et al., 2020; Zheng & Walsham, 2021).

Van Dijk (2020) mengatakan bahwa kesenjangan digital terdiri atas beberapa level yang saling berhubungan, mulai dari keterbatasan akses fisik terhadap teknologi, rendahnya keterampilan dan literasi digital, hingga ketimpangan dalam memperoleh manfaat nyata dari teknologi tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepemilikan perangkat maupun koneksi internet tidak otomatis menciptakan partisipasi yang setara dalam masyarakat digital. Kelompok atau individu yang tidak memiliki kemampuan kritis dalam memanfaatkan teknologi secara produktif cenderung tetap berada pada posisi marginal meskipun secara teknis telah terkoneksi. Dalam konteks komunikasi, kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan sebagian masyarakat untuk memperoleh

informasi yang kredibel, melakukan verifikasi terhadap pesan, dan berpartisipasi aktif dalam ruang publik. Dengan demikian, kesenjangan digital dapat dipahami sebagai bentuk baru ketidaksetaraan sosial dan epistemik, yaitu ketimpangan dalam akses pengetahuan serta kapasitas untuk terlibat dalam proses komunikasi yang bermakna.

Jan Van Dijk dalam bukunya yang berjudul *Digital Democracy: Vision & Reality* mendefinisikan demokrasi digital sebagai pelaksanaan demokrasi melalui berbagai perspektif dengan memanfaatkan media digital dalam komunikasi politik baik secara daring maupun luring (Perspektif et al., 2026). Dengan definisi ini, menjadi lebih jelas bahwa fokus utama demokrasi digital adalah pada perspektif demokrasi, bukan seberapa mudahnya mempraktikkan demokrasi menggunakan media digital untuk komunikasi politik (Rojas dkk., 2017). Pemerintah Indonesia juga berusaha mengatur ruang digital melalui berbagai kebijakan dan regulasi (Soemarwi & Susanto, 2021). Meskipun hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari konten negatif, terdapat kekhawatiran bahwa regulasi tersebut dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan dan kebebasan dalam konteks demokrasi digital.

Di era globalisasi dan kemajuan pesat dalam teknologi informasi, demokrasi digital telah muncul sebagai konsep yang menarik bagi banyak negara, termasuk Indonesia (Wira Dhika dkk., 2023). Di tengah perubahan ini, sebagai negara terpadat keempat di dunia, Indonesia, dengan keragaman budayanya yang kaya, menghadapi tantangan dan peluang yang unik dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kerangka kerja politik dan pemerintahannya (Hafel, 2023). Sejak reformasi 1998, Indonesia telah mengalami transformasi menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Salah satu pendorong utama kemajuan demokrasi digital di Indonesia adalah akses internet yang luas dan prevalensi penggunaan media sosial.

Walaupun Digitalisasi dianggap sebagai kemajuan dan efisiensi didalamnya masih terdapat persoalan mendasar yang menjadi tantangan global, yaitu kesenjangan digital (*digital divide*). Konsep kesenjangan digital kini bukan lagi dipahami sebatas perbedaan kepemilikan perangkat atau akses internet semata, melainkan sebagai ketimpangan multidimensional yang meliputi akses, kemampuan, partisipasi, hingga manfaat sosial dari penggunaan teknologi (Van Dijk, 2020). Digitalisasi pada kenyataannya tidak selalu bersifat membebaskan, tetapi juga dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial yang telah berlangsung sebelumnya. Oleh karena itu, kesenjangan digital dipandang sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan, sumber daya, dan peluang dalam masyarakat (Laskar, 2023; Robinson et al., 2020; Tewathia et al., 2020; Zheng & Walsham, 2021).

Van Dijk (2020) mengatakan bahwa kesenjangan digital terdiri atas beberapa level yang saling berhubungan, mulai dari keterbatasan akses fisik terhadap teknologi, rendahnya keterampilan dan literasi digital, hingga ketimpangan dalam memperoleh manfaat nyata dari teknologi tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepemilikan perangkat maupun koneksi internet tidak otomatis menciptakan partisipasi yang setara dalam masyarakat digital. Kelompok atau individu yang tidak memiliki kemampuan kritis dalam memanfaatkan teknologi secara produktif cenderung tetap berada pada posisi marginal meskipun secara teknis telah terkoneksi. Dalam konteks komunikasi, kondisi

ini berdampak pada terbatasnya kemampuan sebagian masyarakat untuk memperoleh informasi yang kredibel, melakukan verifikasi terhadap pesan, dan berpartisipasi aktif dalam ruang publik. Dengan demikian, kesenjangan digital dapat dipahami sebagai bentuk baru ketidaksetaraan sosial dan epistemik, yaitu ketimpangan dalam akses pengetahuan serta kapasitas untuk terlibat dalam proses komunikasi yang bermakna.

Jan Van Dijk dalam bukunya yang berjudul *Digital Democracy: Vision & Reality* mendefinisikan demokrasi digital sebagai pelaksanaan demokrasi melalui berbagai perspektif dengan memanfaatkan media digital dalam komunikasi politik baik secara daring maupun luring (Van Dijk, 2012). Dengan definisi ini, menjadi lebih jelas bahwa fokus utama demokrasi digital adalah pada perspektif demokrasi, bukan seberapa mudahnya mempraktikkan demokrasi menggunakan media digital untuk komunikasi politik (Rojas dkk., 2017). Pemerintah Indonesia juga berusaha mengatur ruang digital melalui berbagai kebijakan dan regulasi (Soemarwi & Susanto, 2021). Meskipun hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari konten negatif, terdapat kekhawatiran bahwa regulasi tersebut dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan dan kebebasan dalam konteks demokrasi digital. (Achmad Khudori Soleh, 2005)

## **Pembahasan**

### **Dampak media digital terhadap demokrasi**

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang menempatkan masyarakat sebagai otoritas dan pemegang kekuasaan utama. Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, demokrasi di era digital semakin berkembang seiring meningkatnya keterlibatan masyarakat di berbagai aktivitas politik. Kehadiran teknologi dan media sosial memberikan pengaruh besar terhadap cara kerja sama masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjalankan proses demokrasi. Internet terbukti berperan penting dalam mendorong runtuhnya rezim otoriter sekaligus menciptakan harapan baru terhadap percepatan demokratisasi. Melalui internet, penyebaran informasi dapat dilakukan secara cepat dan menjangkau masyarakat secara luas sehingga warga memiliki pemahaman yang lebih terbuka terhadap realitas politik yang terjadi. Berbagai gerakan pro-demokrasi memanfaatkan media daring untuk mengorganisasi aksi, mengumpulkan dukungan, serta menyebarkan pesan yang mendukung perubahan politik yang lebih baik. Demonstrasi dan kampanye digital terbukti efektif dalam menantang kekuasaan otoriter, seperti yang terjadi dalam Revolusi Arab maupun berbagai gerakan demokrasi di sejumlah negara lainnya.

Perkembangan teknologi digital juga membawa perubahan penting dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk dalam proses demokrasi. Era digital menciptakan ruang baru yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan dan menyampaikan aspirasi mereka secara lebih luas. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan baru yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Teknologi digital mengubah hubungan masyarakat dengan pemerintah serta memengaruhi dinamika politik yang berkembang. Di sisi lain, perkembangan

teknologi digital membuka peluang partisipasi politik yang lebih inklusif karena masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik dengan lebih mudah dan cepat. Penggunaan internet menjadi unsur penting dalam perkembangan teknologi digital, dan angka pengguna internet di berbagai daerah di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. (Achmad Khudori Soleh, n.d.)

### **Partisipasi masyarakat melalui internet**

Keikutsertaan publik dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital semakin meningkat (Syarifuddin dkk., 2024). Berbagai inisiatif seperti e-partisipasi dan penggunaan aplikasi seluler untuk pengaduan publik menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif terlibat dalam pemerintahan (I. M. Widodo & Sutarman, 2023). Hal ini menandakan potensi untuk menciptakan demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah kedepan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada bagaimana keterlibatan negara, masyarakat, dan teknologi dapat berkolaborasi. Pendidikan digital dan literasi media harus ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat menyaring informasi dengan lebih baik. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital yang merata sangat penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses dan berpartisipasi di ruang digital. (Slamet et al., 2009)

Beberapa studi relevan dengan penelitian ini. Pertama, studi Hidayat berjudul "Partisipasi Warga Digital dalam Proses Demokrasi Pancasila" bertujuan untuk membandingkan sembilan karakteristik warga digital dengan studi kasus mengenai partisipasi mereka dalam mempromosikan pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan digital dapat meningkatkan partisipasi warga digital dalam mendorong tata kelola yang lebih akuntabel dan demokratis. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat kontemporer untuk memahami sembilan unsur kewarganegaraan digital agar dapat berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, memastikan hubungan antara warga digital dan pemerintah dapat mencapai kesepakatan bersama, sehingga memperkuat Demokrasi Pancasila (Hidayat, 2023).

### **Hoaks dan polarisasi**

Penyebaran berita palsu (M & Hairunnisa, 2023), disinformasi (Watts, 2020), serta ujaran kebencian di media sosial (Sajlan, 2021) telah mengganggu proses demokrasi dan menciptakan polarisasi di masyarakat (Vasist dkk., 2024). Ross Tapsell dalam tulisannya *Disinformation and Democracy in Indonesia* dengan jelas menjelaskan bahwa penyebaran informasi palsu, atau disinformasi dalam konteks politik Indonesia, sebenarnya tidak hanya berasal dari media daring. Selain itu, praktik disinformasi telah terjadi di bawah kepemimpinan Soeharto, namun dipahami dan disebar dengan cara yang berbeda (melalui komunikasi tatap muka dan media massa arus utama) (Tapsell, 2018). Menurutnya, fenomena disinformasi saat ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat tidak lagi mempercayai media arus utama dan bahwa pemerintah tidak menyediakan sumber informasi alternatif. Akibatnya, masyarakat tidak dapat membedakan antara informasi yang benar dan yang salah. Kebingungan dan ketidaktahuan netizen dimanfaatkan oleh sekelompok individu yang ingin mengambil keuntungan dari praktik disinformasi ini (Zainal & Megasari, 2019).

Kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data sangat signifikan, karena pengguna sering kali tidak menyadari risiko yang terkait dengan informasi pribadi mereka yang dibagikan secara daring (Ioannou dkk., 2021; Koohang dkk., 2021). Selain itu, infrastruktur teknologi yang terus berkembang, termasuk akses broadband yang lebih luas, juga merupakan faktor kritis dalam membentuk masa depan demokrasi digital (Helbing dkk., 2023). Meskipun masih ada kesenjangan digital Antara daerah perkotaan dan pedesaan, upaya pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan aksesibilitas teknologi memberikan harapan akan meningkatnya partisipasi publik dalam proses demokrasi (Nurhidayat dkk., 2024)

### **Kesenjangan digital**

Permasalahan kesenjangan digital di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial masyarakat. Laporan Digital 2024: Indonesia yang diterbitkan oleh We Are Social mencatat bahwa penetrasi internet nasional telah mencapai lebih dari 79 persen populasi (We Are Social, 2024). Angka tersebut sering dijadikan indikator keberhasilan transformasi digital nasional. Akan tetapi, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan akses digital karena masih terdapat disparitas yang cukup besar antarwilayah, kelompok sosial, dan tingkat pendidikan. Masyarakat di daerah perkotaan maupun pusat ekonomi cenderung memperoleh akses internet yang lebih baik dan stabil, sedangkan masyarakat di wilayah 3T masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur dan mahalnya biaya akses internet. Di samping itu, tingkat pendidikan dan literasi digital menjadi faktor penting yang menentukan kemampuan individu dalam memanfaatkan teknologi untuk tujuan produktif, seperti pendidikan, aktivitas ekonomi, dan partisipasi masyarakat sipil (Farhatin, 2025; Jayanthi & Dinaseviani, 2022; Samosir, 2018; Syifa et al., 2024). Keadaan ini menandakan bahwa pembangunan digital di Indonesia belum sepenuhnya menghadirkan inklusivitas dan keadilan sosial.

Di Indonesia kesenjangan digital tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga memengaruhi kualitas demokrasi dan ruang publik. Akses terhadap informasi yang dipercaya merupakan syarat penting bagi masyarakat untuk dapat mengambil keputusan secara rasional serta berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan politik. Ketika sebagian masyarakat memiliki keterbatasan akses maupun kemampuan dalam menyaring informasi digital, mereka menjadi lebih mudah terpapar misinformasi dan manipulasi (Choczyńska, 2024; Jaya et al., 2024; Waroi et al., 2025). Dalam kondisi tersebut, kesenjangan digital dapat memperlebar ketimpangan partisipasi politik dan melemahkan kualitas deliberasi publik. Oleh karena itu, kesenjangan digital tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknologi semata, tetapi juga sebagai persoalan etika dan keadilan sosial. Ketidakmerataan akses informasi memiliki dimensi moral karena berkaitan erat dengan hak warga negara untuk memperoleh informasi secara setara, adil, dan bermartabat (Fedorov et al., 2023; Haryatmoko, 2007; Liambomba, 2023).

### **Solusi Inklusi global digital**

Media digital saat ini memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat. Berbagai platform seperti Facebook, Instagram, X, mesin pencari Google, serta beragam platform media sosial dan marketplace lainnya

mengumpulkan data mengenai identitas serta kebiasaan pengguna. Pengumpulan data tersebut bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan pengguna (Iman, N. A., 2023). Besarnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia menjadikan aktivitas sosial di ruang digital berpengaruh terhadap emosi, perasaan, dan ikatan sosial masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat diuji dalam menggunakan rasionalitas ketika menanggapi isu-isu tertentu yang sengaja dibangun untuk menciptakan kesamaan emosi publik. Namun, dinamika yang terjadi di ruang publik digital sering kali tidak menghasilkan pemecahan masalah, melainkan perdebatan yang berujung pada polarisasi sosial.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, inklusi politik masyarakat di ruang digital menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Pertama, transformasi sosial yang dipicu oleh perkembangan teknologi membutuhkan kemampuan adaptasi dari masyarakat. Kemajuan teknologi digital harus disertai dengan kesiapan pengguna dalam mengelola perilaku, cara berpikir, dan tindakannya di ruang digital. Media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang untuk membangun argumentasi yang rasional dan objektif, bukan sekadar mempertahankan dominasi identitas tertentu seperti agama maupun etnisitas. Fokus utama seharusnya terletak pada kualitas argumen yang dapat diperdebatkan dan diperjuangkan secara sehat. Kedua, masyarakat juga perlu menjadikan ruang digital sebagai sarana untuk mengendalikan emosi dan menjaga toleransi sosial. Pengguna media digital tidak seharusnya mudah terpancing oleh isu-isu yang dapat merusak hubungan sosial, mengabaikan hak asasi orang lain, atau memperkuat perpecahan. Walaupun teknologi digital berkembang sangat pesat, faktor manusia tetap menjadi unsur utama yang menentukan arah dan karakter ruang digital tersebut. Karena itu, penguatan nalar kritis dan kesadaran sosial penting dilakukan untuk mengurangi sikap apatis masyarakat terhadap persoalan kebangsaan (Governance & Juantara, 2024).

Selain itu, teknologi digital juga menghadirkan peluang bagi terciptanya partisipasi politik yang lebih inklusif. Melalui platform daring, masyarakat dapat ikut berdiskusi, menyampaikan pendapat, mengorganisasi gerakan politik, menyuarakan aspirasi kepada pemimpin politik, hingga terlibat dalam konsultasi publik. Kehadiran teknologi digital memberi kesempatan kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang aktif secara politik untuk ikut berpartisipasi, sehingga representasi publik dalam proses pengambilan keputusan menjadi lebih luas. Partisipasi politik di era digital juga mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat secara langsung memberikan kritik maupun pengawasan terhadap pemimpin politik melalui media sosial. Di sisi lain, tantangan partisipasi politik digital membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah, platform digital, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan mendukung partisipasi politik yang konstruktif. Pemerintah berperan dalam mengawasi serta melindungi kepentingan masyarakat, platform digital bertanggung jawab menyediakan ruang yang inklusif dan aman, sedangkan masyarakat memiliki peran dalam melakukan pengawasan independen sekaligus menjaga keberlanjutan partisipasi politik di era digital.

## Kesimpulan dan Saran

Transformasi demokrasi di zaman digital menunjukkan bahwa media digital dan teknologi informasi memiliki peranan krusial dalam meningkatkan partisipasi publik dalam aspek politik dan sosial. Inklusi digital menjadi aspek penting dalam mewujudkan demokrasi yang lebih transparan, terbuka, dan berkeadilan sosial. Akan tetapi, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan seperti kesenjangan digital, rendahnya tingkat literasi digital, penyebaran informasi palsu, dan ketidakmerataan akses teknologi di berbagai kalangan masyarakat. Karenanya, demokrasi digital memerlukan tidak hanya akses internet yang luas, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi dengan cara yang kritis dan bertanggung jawab. Melalui kebijakan digital yang menyeluruh, peningkatan pemahaman media, dan distribusi infrastruktur teknologi yang merata, demokrasi digital dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan tanggung jawab pemerintah, dan mewujudkan keadilan sosial secara global.

Pemerintah harus memperluas akses internet dan infrastruktur digital ke daerah-daerah terpencil agar semua warga bisa berpartisipasi secara setara dalam dunia digital. Selain itu, penguatan pendidikan literasi digital dan literasi media sangat penting, terutama untuk generasi muda, agar masyarakat dapat menyaring informasi, menghindari berita palsu, dan menggunakan media digital dengan bijaksana. Lembaga pendidikan diharapkan mampu menggabungkan pendidikan demokrasi digital dalam proses belajar untuk menciptakan masyarakat yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam ruang digital publik. Sebaliknya, diperlukan peraturan digital yang seimbang agar dapat melindungi masyarakat tanpa menghalangi kebebasan berekspresi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, institusi pendidikan, dan platform digital sangat krusial untuk membangun ekosistem demokrasi digital yang inklusif, aman, dan adil.

## Daftar Pustaka

- Achmad Khudori Soleh. (2005). Islam Dan Demokrasi. 3, 1–14. <https://repository.uin-malang.ac.id/15166/>
- Perspektif, B., Rawls, J., & Hidayanto, S. (2026). Mewujudkan Keadilan Digital : Analisis Kesenjangan Akses Informasi. 5456–5472.
- Slamet, Hamdan, A. R. bin, & Deraman, A. (2009). E-demokrasi di indonesia, antara peluang dan hambatan pendekatan fenomenologis 1,2&3. 2009(semnasIF), 85–93. <https://repository.uin-malang.ac.id/10741/>
- Wahidin, D., Utami, I. S., Amalia, A. R., & Aqida, A. (2025). Transformasi Demokrasi Digital di Indonesia: Peluang , Tantangan , dan Solusi ke Depan. 15–42. <https://doi.org/10.26618/jed.v>
- Zaman, S., Politik, P. M., & Mellaz, A. (2024). Edukasi Literasi Politik dan Media untuk Generasi Muda. <https://repository.uin-malang.ac.id/14993/>
- Wahidin, D., Utami, I. S., Amalia, A. R., & Aqida, A. (2025). Transformasi Demokrasi Digital di Indonesia : Peluang , Tantangan , dan Solusi ke Depan. 15–42.
- Zaman, S., Politik, P. M., & Mellaz, A. (2024). Edukasi Literasi Politik dan Media untuk Generasi Muda. <https://repository.uin-malang.ac.id/14993/>